

**MANAJEMEN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA
DALAM MENGELOLA PENUMPUKAN SAMPAH
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh :

Ria Septi Oktavia

Email : riaseptioktavia@yahoo.co.id

Pembimbing : **Dr. Tuti Khairani Harahap, S. Sos, M. Si**
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The dynamics development of Pekanbaru that has improved rapidly accompanied by population growth, industry, investment, and the trade that has been developed quickly in Pekanbaru which has brought the consequences to garbage volume improvement by the societies, where as the government officer ability in handling the garbage problems is very limited. This time, Public Service of Pekanbaru has appointed Private Service in handling the garbage problems. There is Multi Inti Guna Ltd. to keep environment clean. Multi Inti Guna Ltd. has duties to monitoring and carrying out the garbage at eight of twelve sub districts in Pekanbaru, meanwhile the other sub districts is managed by Purity and Horticulture Service of Pekanbaru.

This research was conducted in Pekanbaru. The objective of this research was analyzed and known the factors that have influenced in implementation of handling the garbage problems that has been done by Purity and Horticulture Service gathered to Multi Inti Guna Ltd. in Pekanbaru. The theory of this research used the theory of George R. Terry about the function of management. Private Partnerships in Managing Stacking Waste management is needed in this accumulation of garbage management activities. Therefore, the authors used management theory.

This research is done by using descriptive qualitative method. The technique of sample taken is using Purposive Sampling. The technique of data collection used observation method, interview, and documentation.

This research was findings about the management of public private partnership in handling the garbage problems in Pekanbaru. The researcher finds that there is still ineffective and optimum of public private partnership in handling the garbage problems in Pekanbaru. The influence factors in handling the garbage problems in Pekanbaru is population growth, societies' knowledge and participation, human resources, infrastructures, and funds.

Key Words : Management, Public Private Partnership, Piling Garbage.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dinamika pembangunan Kota Pekanbaru yang cukup pesat serta diiringi oleh pertumbuhan penduduk, industri, investasi, dan perdagangan yang pesat di Kota Pekanbaru yang demikian cepat telah membawa konsekuensi pada peningkatan volume sampah oleh masyarakat. Dengan jumlah timbulan sampah sedemikian, maka kondisi lingkungan Kota Pekanbaru, khususnya pemukiman masyarakat, masuk dalam kategori permasalahan kebersihan yang kompleks. Artinya perlu penanganan yang cepat, tepat, cermat, maju dan terarah dari Pemerintah Daerah melalui kebijakan terkait, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

Permasalahan sampah di perkotaan menjadi masalah yang cukup serius dirasakan oleh masyarakat mengingat volumenya yang kian hari kian membengkak atau bertambah sementara kemampuan aparat pemerintah dalam melayani sangat terbatas. Disamping itu, diperkuat juga dengan kecendrungan masyarakat modern untuk menghasilkan berbagai macam sampah khususnya perilaku hidup masyarakat di kota-kota besar yang salah satunya adalah Kota Pekanbaru, mengingat Kota Pekanbaru tidak lagi mendapatkan piala adipura selama beberapa tahun terakhir.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan dan pengelolaan sampah, dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Ini mengacu pada Perda **Nomor 8 Tahun 2014** tentang Pengelolaan Sampah dalam BAB VI Bagian Pertama Pasal 55.

Meskipun PT. MIG sebagai pemenang tender sudah ditunjuk Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pihak yang mengelola penumpukan sampah di kota Pekanbaru, nyatanya masih

banyaknya sampah yang menumpuk di jalanan.

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan penumpukan sampah bukanlah hal yang bisa di remehkan begitu saja, mengingat terbatasnya anggaran maupun sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah serta ketidaktahuan masyarakat dalam membuang sampah memiliki jam-jam tertentu sehingga diperlukan adanya kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Manajemen Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mengelola Penumpukan Sampah di Kota Pekanbaru”**.

Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mengelola Penumpukan Sampah di Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru?

KONSEP TEORI

1. Manajemen

Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mengelola Penumpukan Sampah dibutuhkan manajemen dalam aktivitas pengelolaan penumpukan sampah ini. Oleh sebab itu, penulis memakai teori manajemen.

Menurut **Relawati (2012:1)** secara harfiah manajemen merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris “management”, yang di dalam kamus diterjemahkan dalam dua makna yaitu yang pertama adalah direksi, pimpinan. Sedangkan yang kedua adalah ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Pada terjemahan pertama,

manajemen mempunyai makna sebagai orang yang menjalankan perusahaan atau organisasi. Pada terjemahan kedua manajemen merupakan proses pengelolaan perusahaan atau organisasi. Jadi, manajemen merupakan suatu homonim yang bisa bermakna “orang” dan “suatu proses”. Meskipun kedua makna berbeda namun keduanya digunakan di lingkungan yang sama, yakni pada suatu perusahaan atau organisasi lainnya.

Haiman dalam **Manullang (2009:3)** mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Terry (2006:4) mendefinisikan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Sedangkan menurut **Hasibuan (2005:2)** manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut **Daft (2002:8)** mendefinisikan manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi.

Menurut **Sikula** dalam **Shalihah (2014:19)** menyatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi

berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Jika ditarik kesimpulan dari beberapa pengertian diatas, maka Manajemen adalah suatu aktivitas yang melibatkan lebih dari dua orang atau organisasi yang bekerjasama yang didalamnya terdapat unsur *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* untuk mencapai tujuan bersama. *Planning* atau biasa disebut dengan perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan.

Penulis mengambil pandangan dari salah satu ahli manajemen yang bernama **George R. Terry** dalam bukunya *Asas-Asas Manajemen* terdapat empat fungsi manajemen sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (*Plan*), karena itu hendaknya tujuan yang ditetapkan “jelas, realistis, dan cukup menantang” untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki.

Soedarsono dalam **Relawati (2012:52)** perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai fungsi untuk memilih dan menentukan cara-cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam batas waktu tertentu.

Terry (2006:163) mendefinisikan perencanaan merupakan tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan assumsi-assumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

b. Pengorganisasian(*Organizing*)

Dengan *organizing* dimaksud mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.

Terry (2006:233) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Yahya (2006:33) pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.

c. Penggerakkan/Pengarahan (*Actuating*)

Terry (2006:313) penggerakkan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran tersebut.

Yahya (2006:111) secara umum, pengarahan dapat diberikan batasan sebagai suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Siagian (2005:95) penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan

ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.

Jadi pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang, karena pelaksanaan perencanaanlah yang diawasi dan sebaliknya pengawasan ditujukan pada usaha mencegah timbulnya berbagai jenis dan bentuk penyimpangan atau penyelewengan, baik disengaja maupun tidak. Semua fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*), atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian.

Yahya (2006:133) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.

Definisi pengawasan menurut **Mockler** dalam **Yahya (2006:133)** pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan

cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

2. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*)

Menurut Darwis, dkk (2009:3) perlu digaris bawahi bahwa istilah “Kerjasama” tidak sama dengan sama-sama kerja. Secara sepintas dapat dinyatakan bahwa “Kerjasama: merujuk pada “Tujuan yang sama”, sedangkan “sama-sama kerja” belum tentu merujuk pada “Tujuan yang sama”. Makin tinggi peradaban manusia, maka makin banyak pula jenis kebutuhannya, sehingga memerlukan bentuk kerjasama yang lebih besar dan lebih luas. Diperlukan suatu bentuk pengelolaan, supaya kegiatan menjadi teratur dan penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusianya maupun bahan dan peralatan secara efektif dan efisien serta tercapainya tujuan secara optimal. Bentuk pengelolaan inilah yang disebut dengan manajemen. Makin besar dan luas kerjasama tersebut, maka semakin *urgen* dan *complete* pula bentuk pengelolaan yang diperlukan, karena semakin besar dan luas bentuk kerjasamanya maka jelas memerlukan sumber daya yang semakin besar pula, sehingga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar jika terjadi kesalahan dalam pengelolaannya. Maka disinilah peran penting “manajemen” tersebut.

Menurut Wursanto (2005:54) kerjasama adalah suatu perbuatan bantu-membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, semua anggota atau semua warga yang menurut tingkatan-tingkatannya dibedakan menjadi administrator.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam meneliti masalah

penelitian “Manajemen Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mengelola Penumpukan Sampah di Kota Pekanbaru” adalah penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, penulis bertitik tolak dari data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelasan, dan berakhir dengan suatu teori.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Pekanbaru, Penulis tertarik memilih obyek penelitian ini karena penumpukan sampah yang semakin meningkat di Kota Pekanbaru, mengingat Kota Pekanbaru tidak lagi mendapatkan piala Adipura atau penghargaan sebagai kota terbersih tingkat nasional selama beberapa tahun terakhir. Yang sebagian besar data diambil dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sebagai pengawas dan pelaksana pengelolaan penumpukan sampah serta PT. Multi Inti Guna sebagai pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah yang dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Kriteria dalam memilih informan pada penelitian ini adalah mengetahui dengan baik pelaksanaan pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik Purposive Sampling. Adapun yang dijadikan informan yang dianggap mengetahui dengan mendalam serta dapat memberikan keterangan yang dapat dipercaya. Adapun informan penelitian ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta PT. Multi Inti Guna, yaitu antara lain :

- a. Kasi Kebersihan DKP
- b. Kabid Pembinaan Masyarakat DKP

- c. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan perlengkapan DKP
- d. Sub Bagian Penyusunan Program DKP
- e. PT. Multi Inti Guna, serta
- f. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari informan dalam pelaksanaannya diperoleh dari wawancara dan jawaban informan pada pertanyaan yang telah diberikan kemudian pengamatan langsung di lapangan. Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi ataupun opini dari informasi mengenai kerjasama pemerintah dan swasta dalam mengelola penumpukan sampah di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data. Data penunjang yang relevan dengan kajian penelitian. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerjasama pemerintah dan swasta dalam mengelola penumpukan sampah di Kota Pekanbaru. Data diperoleh dari dokumen dan laporan yang ada yaitu visi dan misi DKP Kota Pekanbaru, tugas pokok dan fungsi DKP Kota Pekanbaru, tonase sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar, jumlah armada pengangkut DKP Kota Pekanbaru dan PT. Multi Inti Guna (MIG) serta jadwal pengangkutan sampah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu peneliti dalam teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Terkait dengan masalah penelitian, teknik pengumpulan data diperoleh teknik wawancara tidak terstruktur, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam obyek penelitian.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung oleh penulis dilapangan atau lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengamati fenomena sosial dan gejala yang ada di lokasi penelitian, untuk mendukung keabsahan data dari apa yang telah dan akan di observasi.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa aturan lembaga, foto, dokumen lembaga, buku-buku maupun penelitian terdahulu, buletin atau berita-berita yang disiarkan ke media massa yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan situasi sosial yang diteliti.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang dimana melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Manajemen Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mengelola Penumpukan Sampah di Kota Pekanbaru

Pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru salah satu upaya untuk menciptakan Kebersihan dan Keindahan kota. Persoalan sampah merupakan salah satu persoalan yang dihadapi di kota-kota besar. Di Riau, Kota Pekanbaru bisa dikatakan di tengah-tengah wilayah. Dengan letak yang demikian, membuatnya cukup menjadi strategis sebagai ibukota Provinsi. Dengan dijadikannya Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perindustrian dan perdagangan menjadikan dirinya sebagai kota yang harus siap dengan segala konsekuensinya.

Menurut **T.K Harahap (2015)** dalam jurnal *Ethics Green Open Space Public Service by Government Pekanbaru City* mengatakan “*Every citizen undertake activities that relate to government bureaucracy because one of its functions is to provide service to society with refer to public service ethics. Government of Pekanbaru city must implement ethical public service such as the provision of green open space*” yaitu setiap warga negara melakukan kegiatan yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah karena salah satu fungsinya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu pada etika pelayanan publik. Pemerintah Kota Pekanbaru harus

menerapkan pelayanan publik seperti penyediaan ruang terbuka hijau.

Dalam penelitian, penulis memfokuskan permasalahan ke dalam 4 (empat) indikator yang merupakan fungsi dari manajemen yang dapat menerangkan bagaimana kerjasama pengelolaan penumpukan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru dan dengan Pihak Swasta yaitu PT. Multi Inti Guna (MIG). Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru, penulis meneliti dengan menggunakan teori George R. Terry yang meliputi indikator-indikator sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Penggerakkan/pengarahan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing-masing indikator tersebut menurut jawaban dari wawancara terhadap informan yang telah dilakukan. Untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator tersebut diatas, penulis akan menguraikan lebih jelas seperti yang tercantum sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan penetapan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan kemudian, dalam batas waktu tertentu, untuk mendapatkan hasil tertentu, dengan penggunaan faktor-faktor tertentu.

Kerjasama Pemerintah dengan pihak PT. Multi Inti Guna (MIG) berlangsung untuk jangka pendek saja, hal ini dikarenakan jika kemitraan ini berjalan efektif dalam mengelola penumpukan sampah di Kota Pekanbaru akan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengelolaan penumpukan sampah selanjutnya.

Perencanaan kerjasama yang dilakukan dari keseluruhan yang

tertuang di poin-poin kerjasama di dalam Perda Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah pasal 55 bisa dilakukan secara keseluruhan ataupun sebagiannya saja. Tugas swasta dalam kerjasama ini hanya sebatas mengutip dan pengangkutan sampah saja di 8 kecamatan dari perumahan, jalan-jalan protokol, TPS-TPS, ruko-ruko, dan kemudian dibuang ke TPA. Sedangkan untuk di 8 kecamatan itu DKP hanya bertugas menyapu jalan protokol dan median jalan saja.

Adapun dalam perencanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam mengelola penumpukan sampah ditetapkan standar minimum jumlah sampah yang diangkut oleh pihak PT. Multi Inti Guna.

Jumlah minimum dari sampah yang diangkut yang ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kepada PT. Multi Inti Guna adalah sebesar 305 ton target/harinya. Padahal produksi sampah di Pekanbaru mencapai 610 ton/harinya. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta dengan penetapan minimal yang hanya 305 ton target/hari berarti masih menyisakan sekitar 305 ton lagi, hal ini tidak berbeda jauh ketika tanggung jawab pengelolaan pengangkutan sampah masih dipegang oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam mengelola penumpukan sampah ini dari 12 kecamatan dibagi menjadi 2 wilayah kerja pengangkutan sampah yaitu 8 kecamatan dikelola oleh PT. Multi Inti Guna sedangkan 4 kecamatan lagi dikelola oleh DKP.

Pembagian kerja sudah disusun sedemikian rupa sehingga mulai dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru hingga pihak swasta yaitu PT. Multi Inti Guna (MIG)

dan staff-staff yang terkait dalam kerjasama ini sudah cukup mengetahui akan tugas mereka masing-masing

Selain pembagian kerja, prinsip lain yang harus ada dalam pengorganisasian adalah koordinasi. Koordinasi pada hakekatnya merupakan upaya memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.

Koordinasi kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam mengelola penumpukan sampah di Kota Pekanbaru sangat dibutuhkan mengingat luas wilayah kerjanya dan banyaknya permasalahan sosial yang terjadi akibat penumpukan sampah ini. Adanya peraturan baru tentang membuang sampah di jam-jam tertentu kurang dianggap serius oleh masyarakat, sejalan dengan adanya peraturan membuang sampah di jam-jam tertentu maka diperlukan adanya sanksi bagi yang melanggar. Sanksi yang dibuat maka DKP perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

Selain koordinasi antar Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru dengan PT. Multi Inti Guna (MIG) sebagai pemenang tender, DKP Kota Pekanbaru juga perlu memiliki koordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan, kehakiman. Hal ini dikarenakan agar masyarakat yang membuang sampah tidak pada jam yang telah ditentukan dapat diberikan sanksi.

DKP juga melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam pembuatan sanksi. Namun, untuk saat ini DKP masih dalam tahap sosialisasi tentang peraturan membuang sampah di jam yang telah ditentukan. Disamping itu, peraturan yang ada harus diikuti dengan sanksi yang akan diberikan sehingga masyarakat taat akan peraturan yang telah dibuat dan Kota Pekanbaru dapat terjaga kebersihannya.

Dari penjelasan-penjelasan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian indikator pengorganisasian (*organizing*) dalam hal pembagian kerja sudah dilakukan dengan baik. Hanya saja pada indikator koordinasi masih ada beberapa masalah dalam menjalankan pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru.

3. Penggerakkan/Pengarahan (*Actuating*)

Bukan hanya usaha untuk menggerakkan anggota kelompok saja, tetapi juga dapat menggerakkan usaha dari kalangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan penumpukan sampah yang di mulai dari hal terkecil sekalipun misalnya dengan membuang sampah sesuai dengan jam yang telah ditentukan dan masyarakat juga dapat menggunakan call center yang telah disediakan oleh pihak PT. Multi Inti Guna.

Dalam melaksanakan pengelolaan penumpukan sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru juga berupaya agar tujuan dari Kerjasama dengan PT. Multi Inti Guna dapat tercapai diperlukan adanya keikutsertaan masyarakat dalam mengelola penumpukan sampah. Salah satu upaya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah dengan cara melakukan penggerakkan/pengarahan maupun sosialisasi kepada masyarakat.

Upaya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dalam menekan jumlah tumpukan sampah yang semakin meningkat dilakukan melalui pemberitahuan dan pengarahan maupun sosialisasi kepada masyarakat. Seperti pemasangan plang-plang pemberitahuan tentang aturan membuang sampah dan juga media cetak seperti koran maupun media elektronik yang berupa iklan. Namun, fakta di lapangan plang-plang mengenai aturan jam pembuangan

sampah hanya di jumpai di beberapa titik saja. Hal ini dilakukan belum menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat terbukti dari masih adanya masyarakat yang membuang sampah bukan pada waktu yang ditentukan.

Kegiatan pengarahan dan sosialisasi yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru kepada masyarakat dilakukan dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat RT/RW maupun sekolah-sekolah. Akan tetapi yang terjadi di lapangan, pengarahan tersebut tidak banyak RT/RW yang belum mendapatkan sosialisasi tentang pembuangan sampah.

Selain melakukan sosialisasi untuk pemberitahuan tentang aturan jam pembuangan sampah juga dilakukan melalui pemberitahuan berupa plang-plang, media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya.

Pemberitahuan jam pembuangan sampah tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi secara langsung saja, tetapi juga dilakukan melalui pemasangan plang-plang, media cetak, media elektronik dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah hanya sebatas pemasangan plang-plang saja dan itupun hanya ada di beberapa titik saja. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Dari beberapa wawancara kepada informan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan penggerakkan/pengarahan dalam mengelola penumpukan sampah yaitu masyarakat harus membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan dalam memberikan sosialisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru menunggu permintaan dan balasan surat dari pihak yang disurati untuk dilakukan sosialisasi tersebut.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan pengangkutan sampah di titik-titik pembuangan sampah di Kota Pekanbaru yang dibagi dengan 3 shift dalam sehari, dengan adanya pembagian 3 shift kerja dalam sehari dimaksudkan agar sampah yang ada di Kota Pekanbaru dapat terkendali dengan baik.

Dengan adanya 3 shift kerja dapat mengendalikan sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Hal yang terjadi adalah masih ada saja sampah di TPS meskipun sudah diangkut oleh petugas sehingga Kota terlihat tidak bersih.

Penetapan standar dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dilakukan guna meminimalisir penyimpangan yang terjadi.

Standar dalam pelaksanaan pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru khususnya kerjasama Pemerintah dan Swasta dapat meringankan beban kerja Pemerintah Kota Pekanbaru.

Perbaiki pelaksanaan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan pengelolaan penumpukan sampah baik masalah yang datang dari pihak PT. Multi Inti Guna (MIG) maupun masyarakat Kota Pekanbaru. Sanksi diberikan dengan tujuan agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Sanksi yang diberikan apabila pihak mitra/swasta dari Dinas Kebersihan Pertamanan berupa teguran lisan bila juga tidak diindahkan akan diberikan surat teguran hingga sampai pada pemutusan kontrak kerjasama.

Pihak PT. Multi Inti Guna (MIG) telah melanggar tanggung jawabnya yaitu kurang optimalnya kinerja pengelolaan penumpukan sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Pemberian sanksi tersebut diberikan apabila pihak mitra tidak dapat menangani permasalahan di lapangan yang mana wilayah tersebut merupakan tanggung jawabnya yang tertuang di dalam

kontrak kerjasama dengan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), tidak melaksanakan dan mematuhi aturan dalam kontrak kerja serta tidak dapat menyanggupi target yang sudah ditentukan Pemerintah.

Tidak hanya pihak pengelola sampah saja yang menangani penumpukan sampah yang ada di Kota Pekanbaru tetapi peran serta masyarakat juga sangat penting. Dalam pelaksanaan sanksi yang diberikan tidak hanya pihak mitra/swasta saja yang mendapatkan sanksi tetapi juga dengan masyarakatnya sendiri akan tetapi yang terjadi dilapangan adalah masyarakat tidak membuang sampah pada jam yang telah ditentukan yaitu pukul 19.00 WIB sampai 05.00 WIB.

Sanksi yang ada belum diterapkan untuk masyarakat yang melanggar aturan pembuangan sampah. Seharusnya sosialisasi tentang aturan jam membuang sampah harus langsung disertai dengan sosialisasi dan penerapan sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar. Walaupun, telah diterapkan sanksi bagi pihak mitra/swasta dan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan penyimpangan yang terjadi.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Penumpukan Sampah di Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Manajemen Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mengelola Penumpukan sampah di Kota Pekanbaru, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk yang semakin hari semakin meningkat akan memberikan ancaman jumlah produksi

sampah yang semakin besar pula, dan itu akan membuat kesulitan dalam mengendalikan pelaksanaan pengelolaan penumpukan sampah.

Bertambahnya jumlah penduduk sudah tentu beriringan dengan bertambahnya pula produksi sampah di Kota Pekanbaru dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kebersihan juga menjadi penyebab dari masalah sampah yang menghinggapi Kota Pekanbaru hari ini.

Pertumbuhan penduduk sangat mengancam dalam pengendalian kebersihan jika tidak diiringi dengan bertambahnya sarana pendukung lainnya. Kota Pekanbaru yang memiliki populasi penduduk yang bergerak sangat cepat menyebabkan Pemerintah harus berusaha mengatasi jumlah penumpukan sampah yang didominasi dengan sampah rumah tangga.

2. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penanggulangan kebersihan di Kota Pekanbaru. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Kebersihan Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, dukungan dan peran aktif masyarakat sangat diharapkan dan apabila masyarakat kurang aktif maka masalah penumpukan sampah tidak dapat tertangani dengan maksimal dan baik.

Kurang aktifnya peran masyarakat dalam mengendalikan penumpukan sampah di lingkungan mereka sendiri. Menurutnya, masyarakat membuang sampah secara estafet dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang aturan membuang sampah menyebabkan masyarakat tidak taat dengan aturan yang dibuat.

Meskipun, masyarakat mengetahui aturan jam buang sampah tersebut menyebabkan mereka masih tidak peduli akan aturan yang telah ada. Hal ini dikarenakan lagi-lagi petugas pengangkutlah yang bertugas mengangkut sampah hanya sesekali mengangkut sampah yang ada di lingkungan masyarakat.

Masyarakat tidak mengetahui bahwa pengelolaan penumpukan sampah saat ini dikelola oleh pemerintah dan juga swasta. Mereka menilai bahwa dengan adanya kerjasama ini, tidak ada perbedaan sama sekali dengan sebelum adanya kerjasama ini dilakukan.

Partisipasi masyarakat artinya keikutsertaan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan penumpukan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta PT. Multi Inti Guna dengan adanya layanan pengaduan masyarakat dapat membantu mengatasi rumitnya permasalahan penumpukan sampah.

Dalam mengatasi masalah pengangkutan sampah ini seluruh instansi hingga elemen masyarakat sekalipun harus ikut serta dalam pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru. Dan dari pada itu, sangat diharapkan juga peran aktif masyarakat dalam pengendalian penumpukan sampah meskipun dari hal terkecil dengan membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan demi mewujudkan Kota Pekanbaru yang bersih dan sehat. Bentuk lain dari partisipasi masyarakat juga dapat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mematuhi dan memahami peraturan yang ada.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru. Tanpa adanya sumber daya manusia

yang terampil memiliki kompetensi yang handal dibidangnya dengan didukung jumlah sumber daya manusia yang memadai akan dapat mewujudkan keberhasilan dari suatu pelaksanaan tersebut. Diperlukan suatu bentuk pengelolaan, supaya kegiatan menjadi teratur dan penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusianya maupun bahan dan peralatan secara efektif dan efisien serta tercapainya tujuan secara optimal.

Dalam pengelolaan penumpukan sampah oleh pemerintah dan swasta, masing-masing menyediakan armada pengangkut tersendiri tetapi pekerja pengangkut sampah sebagian besar masih berasal dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dan masih bekerja bersama pihak swasta yaitu PT. Multi Inti Guna.

4. Sarana dan Prasarana

Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan merupakan strategi yang paling utama dan terprogram dalam kegiatan pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru maupun pihak swasta yang telah ditunjuk sebagai mitra kerjasama Pemerintah yaitu PT. Multi Inti Guna (MIG). PT. Multi Inti Guna sebagai pemenang tender melaksanakan dan menyediakan armada angkutan sampah untuk mengangkut sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian penulis 80 unit armada pengangkut sampah yang tertuang di dalam kontrak kerjasama hanya 65 unit armada saja yang tersedia. Pihak PT. Multi Inti Guna (MIG) tetap mengusahakan kekurangan dari jumlah armada yang ada di kontrak kerjasama pemerintah dan swasta tersebut. Meskipun dengan keterbatasan armada pihak PT. Multi Inti Guna (MIG) melakukan 3 shift pengangkutan dalam sehari dapat tercover. Tetapi yang terjadi

di lapangan adalah masih banyak sampah yang tidak terangkut.

5. Dana/Anggaran

Dana/anggaran merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan maupun program. Dalam kerjasama pemerintah dan swasta dalam mengelola penumpukan sampah di Kota Pekanbaru, sumber dana/anggaran untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana yang telah dibuat, pihak dinas mendapatkan dana dari APBD perubahan. Tidak hanya kegiatan kerjasama pemerintah dan swasta dalam mengelola sampah dibutuhkan anggaran yang besar tetapi juga kegiatan sosialisasi yang dilakukan DKP terhadap mensosialisasikan aturan membuang sampah.

Anggaran yang digunakan untuk persiapan penyediaan armada pengumpulan sampah, tonase yang telah ditetapkan harus tercapai. Di dalam kontrak yang telah disetujui Dinas Kebersihan dan Pertamanan, armada yang digunakan oleh PT. Multi Inti Guna (MIG) sebanyak 80 unit. Namun, yang terjadi di lapangan kurang dari 80 unit armada. Padahal tidak sedikit dana yang dikeluarkan pemerintah untuk proyek pengelolaan penumpukan sampah ini yang dilakukan secara multiyears.

Pemberitahuan jam pembuangan sampah tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi secara langsung saja, tetapi juga dilakukan melalui pemasangan plang-plang, media cetak, media elektronik dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah hanya sebatas pemasangan plang-plang saja dan itupun hanya ada dibeberapa titik saja. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Mencermati biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan

penumpukan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru tidaklah sedikit, maka pemerintah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan berusaha mencari solusi agar permasalahan sampah ini dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Selain itu sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan penumpukan sampah ini sangatlah terbatas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai Manajemen Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mengelola Penumpukan Sampah di Kota Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan :

1. Manajemen Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mengelola Penumpukan Sampah di Kota Pekanbaru

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah menunjuk PT Multi Inti Guna (MIG) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengangkut sampah di Kota Pekanbaru. Meskipun sudah ditunjuk, nyatanya masih banyak sampah yang menumpuk di jalanan.

Pelaksanaan pengelolaan penumpukan sampah yang dilakukan secara kerjasama antara pemerintah dan swasta belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih banyaknya sampah yang tertumpuk di TPS-TPS yang ada di Kota Pekanbaru khususnya yang menjadi wilayah kerja pemenang tender dari pihak swasta yaitu PT. Multi Inti Guna (MIG). Meskipun pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru telah dilakukan kerjasama secara

multiyears oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, tetap saja sampah yang ada di Pekanbaru tidak tertangani dengan baik.

PT Multi Inti Guna (MIG) selaku pemenang proyek untuk pengelolaan sampah di Pekanbaru masih menyisakan sejumlah permasalahan. Mulai dari tidak terangkutnya sampah, sampai jumlah armada yang kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam kontrak kerjasama.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Penumpukan Sampah di Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru dinilai masih belum maksimal. Dalam pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Penduduk
- b. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat
- c. Sumber Daya Manusia
- d. Sarana dan Prasarana
- e. Dana/Anggaran

Jumlah penduduk yang semakin hari semakin meningkat akan memberikan ancaman jumlah produksi sampah yang semakin besar pula, dan itu akan membuat kesulitan dalam mengendalikan pelaksanaan pengelolaan penumpukan sampah.

Bertambahnya jumlah penduduk sudah tentu beriringan dengan bertambahnya pula produksi sampah di Kota Pekanbaru dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kebersihan juga

menjadi penyebab dari masalah sampah yang menghinggapi Kota Pekanbaru hari ini.

Kurangnya sosialisasi tentang peraturan jam pembuangan sampah belum dilakukan secara optimal, akibatnya banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya dan pada akhirnya masyarakat membuang sampah secara terus menerus tidak sesuai jamnya setelah pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas.

Mencermati biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan penumpukan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru tidaklah sedikit, maka pemerintah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan berusaha mencari solusi agar permasalahan sampah ini dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Selain itu sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan penumpukan sampah ini sangatlah terbatas.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Manajemen Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mengelola Penumpukan Sampah di Kota Pekanbaru, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat lebih meningkatkan lagi terhadap pengawasan pengelolaan penumpukan sampah di Kota Pekanbaru. Pengawasan dapat dilakukan secara terus menerus dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana perkembangan dan keberhasilan dari kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam mengelola penumpukan sampah di Kota Pekanbaru. Jika penanganan pengelolaan penumpukan sampah yang dilakukan secara bekerjasama ini tidak berjalan lancar, akan lebih bagus jika pengelolaannya di kembalikan seperti

dahulu. Karena dengan hanya pengelolaan yang dilakukan pihak kecamatan dan DKP seperti tahun-tahun sebelumnya cukup baik bahkan Kota Pekanbaru mendapatkan penghargaan adipura secara berturut-turut setiap tahunnya.

- b. Seharusnya pihak DKP lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai waktu apa saja yang diperbolehkan untuk membuang sampah, disertai dengan sosialisasi dan penerapan sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar, agar masyarakat dapat mematuhi waktu untuk membuang sampah. Selain adanya sosialisasi yang dilakukan, diharapkan juga adanya dukungan, partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan penumpukan sampah yang makin meningkat di Kota Pekanbaru. Dalam penanganan pengelolaan penumpukan sampah, sarana dan prasana yang dimiliki oleh DKP dan PT. MIG haruslah lebih ditingkatkan lagi dari jumlah yang dimiliki sebelumnya agar dapat mengangkut seluruh sampah yang di produksi masyarakat setiap harinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amirullah, dkk. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Daft, Richard L. 2002. *Manajemen, Edisi Kelima, Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Darwis, dkk. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan*

Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Hasibuan, H. Malayu. 2005. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Manullang, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mitchell, Bruce, dkk. 2010. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen Pendekatan Aplikasi Bidang Pertanian*. Malang: UMM Press.

Rukmana, Nana, dkk. 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Sasmita, Jumiaty, dkk. 2012. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press.

Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

———. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Syafii, Inu Kencana, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Terry, George R. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT. Alumni.

Wursanto, Ignasius. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dokumen :

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan, dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Karya Ilmiah :

Harahap, Tuti Khairani. "Ethics Green Open Space Public Service by Government Pekanbaru City." *Elsevier Procedia-Social and Behavioral Sciences* 211 (2015): 945-952, Elsevier UK.

Mahmudi. 2007. *Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik*. Sinergi, Vol. 9 No. 1, Januari 2007 Hal. 53-67.

Nahrudin, Zulfan. 2014. *Kemitraan Publik-Private dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Shalihah, Iis. 2014. *Manajemen Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau*. Pekanbaru: Universitas Riau.

Artikel :

Tribun Pekanbaru, 28 Desember 2015 hal 17.